



LAPORAN
HASIL PENILAIAN PENDAHULUAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2020

Survei dan Analisis

Survei dilakukan dengan cara menyebarkan angket/kuesioner sebagai instrumen kepada 30 responden. Untuk survei Persepsi Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan Publik, responden diambil dari unsur mahasiswa. Sementara, untuk survei integritas jabatan dan organisasi, responden diambil dari pendidik dan tenaga kependidikan. Responden adalah orang yang pernah menggunakan jasa pelayanan pada satuan kerja yang dijadikan sasaran penilaian. Tipe pertanyaan yang digunakan pada angket/kuesioner adalah pertanyaan tertutup. Angket yang disusun menggunakan pengukuran data ordinal, merujuk pada skala 1-4, dengan empat alternatif jawaban.

1. Survei Persepsi Korupsi

Survei persepsi korupsi merupakan survei yang dilakukan untuk menilai tingkat persepsi korupsi mahasiswa terhadap PTKIN. Hasil survei ini merupakan indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, yang diukur melalui nilai persepsi korupsi dengan bobot nilai 15.

Persepsi korupsi responden dinilai berdasarkan pilihan jawaban pada masing-masing pernyataan yang menunjukkan empat tingkatan. Semakin tinggi rata-rata nilainya, maka indeks persepsi korupsi semakin baik, yang menunjukkan bahwa satker dianggap oleh masyarakat/responden semakin menuju pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Selanjutnya data hasil survei dianalisis dan diolah secara statistik/kuantitatif sehingga diperoleh nilai/indeks persepsi korupsi yang merupakan salah satu indikator komponen hasil dari penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI).

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai sebagaimana berikut (instrumen dan hasil survei secara rinci terlampir).

Tabel 2
Indeks Survei Persepsi Korupsi pada 16 PTKIN

NO.	NAMA PTKIN	INDEKS PERSEPSI KORUPSI
1	IAIN Kudus	3,48
2	UIN Jakarta	3,31
3	IAIN Bengkulu	3,59
4	IAIN Tulungagung	3,59

5	IAIN Salatiga	3,92
6	UIN Malik Ibrahim Malang	3,30
7	UIN Raden Fatah Palembang	3,44
8	IAIN Batusangkar	3,22
9	UIN Sunan Ampel Surabaya	3,26
10	UIN Sumatera Utara	3,29
11	IAIN Metro Lampung	3,49
12	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	3,26
13	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	3,22
14	IAIN Bangka Belitung	3,22
15	IAIN Palopo	3,38
16	STAIN Mandailing Natal	3,18

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Indeks Persepsi Korupsi pada 16 PTKIN sudah cukup baik, yakni di atas 3,00 (skala 1,00 – 4,00).

2. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

Survei persepsi kualitas pelayanan publik merupakan survei yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada PTKIN. Responden (mahasiswa) memilih salah satu pelayanan yang ada pada PTKIN untuk selanjutnya dinilai kualitas pelayanannya.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai sebagaimana berikut (instrumen dan hasil survei secara rinci terlampir).

Tabel 3

Indeks Survei Persepsi Pelayanan Publik pada 16 PTKIN

NO.	NAMA PTKIN	INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK
1	IAIN Kudus	3,45
2	UIN Jakarta	3,26
3	IAIN Bengkulu	3,57
4	IAIN Tulungagung	3,29
5	IAIN Salatiga	3,90
6	UIN Malik Ibrahim Malang	3,08
7	UIN Raden Fatah Palembang	3,17
8	IAIN Batusangkar	3,07
9	UIN Sunan Ampel Surabaya	3,09
10	UIN Sumatera Utara	3,15
11	IAIN Metro Lampung	3,27
12	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	3,01

13	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	3,05
14	IAIN Bangka Belitung	3,07
15	IAIN Palopo	2,98
16	STAIN Mandailing Natal	3,06

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Indeks Persepsi Pelayanan Publik pada 16 PTKIN sudah cukup baik, yakni hampir seluruhnya di atas 3,00 (skala 1,00 – 4,00). Hanya ada satu PTKIN yang nilai persepsi pelayanan publiknya kurang dari 3,00.

3. Survei Integritas Jabatan dan Organisasi

Survei integritas jabatan dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pegawai terhadap akuntabilitas kinerja jabatan, apakah sudah memahami mandat jabatan, kesesuaian tugas dan kegiatan dengan mandat, dan ukuran keberhasilan jabatan sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki. Sedangkan survei integritas organisasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai mengenai efektivitas sistem pengendalian internal organisasi, organisasi/struktur organisasi, pengelolaan keuangan, serta praktik penerapan integritas dan kode etik di lingkungan unit kerja.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai sebagaimana berikut (instrumen dan hasil survei secara rinci terlampir).

Tabel 3

Indeks Survei Integritas Jabatan dan Organisasi pada 16 PTKIN

NO.	NAMA PTKIN	SURVEY INTEGRITAS JABATAN DAN ORGANISASI
1	IAIN Kudus	-
2	UIN Jakarta	3,28
3	IAIN Bengkulu	3,58
4	IAIN Tulungagung	3,61
5	IAIN Salatiga	3,98
6	UIN Malik Ibrahim Malang	3,34
7	UIN Raden Fatah Palembang	3,44
8	IAIN Batusangkar	3,25
9	UIN Sunan Ampel Surabaya	3,38
10	UIN Sumatera Utara	3,37
11	IAIN Metro Lampung	3,46
12	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	3,27
13	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	3,30

14	IAIN Bangka Belitung	3,25
15	IAIN Palopo	3,01
16	STAIN Mandailing Natal	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai integritas jabatan dan organisasi pada 16 PTKIN sudah cukup baik, yakni rata-rata di atas 3,00 (skala 1,00 – 4,00). Namun demikian, ada unsur kelalain dari petugas verifikator pada IAIN Kudus dan STAIN Mandailing Natal, yakni tidak melaksanakan survei integritas jabatan dan organisasi.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PMPZI, survei persepsi korupsi, survei kualitas pelayanan publik, survei integritas jabatan dan organisasi, dapat disimpulkan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Sebagian besar PTKIN yang dilakukan penilaian telah memiliki data dukung (*evidence*) pembangunan zona integritas yang cukup lengkap;
2. Sebagian besar PTKIN yang dilakukan penilaian telah melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan.
3. Rata-rata hasil survey Persepsi Korupsi, Persepsi Kualitas Pelayanan Publik, dan Integritas Organisasi sudah cukup baik.

B. Saran

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama masa Penilaian Pendahuluan yang berlangsung dari tanggal 12 - 29 Februari 2020, disarankan kepada tim kerja pembangunan zona integritas pada 16 PTKIN untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melengkapi beberapa data dukung (*evidence*) yang belum tersedia di beberapa komponen penilaian;
2. Melakukan penataan terhadap data dukung (*evidence*), baik *hard-copy* maupun *soft-copy*, agar lebih mudah ketika diverifikasi oleh Tim Penilai Internal (TPI);
3. Mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga tidak mengalami kendala ketika digunakan;

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sebelum tim penilai internal (TPI) melakukan penilaian lebih lanjut.

Jakarta, 02 Maret 2020
a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris

Ttd

Imam Safe'i